



KUMPULAN ABSTRAK JURNAL

**KOLEKSI E-DEPOSIT
PERPUSTAKAAN
NASIONAL**

TEMA POLITIK

2020



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

Penyusun : Catur Fitri Widiyawati

Penyunting : Elah Laelasari

**MENDORONG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA
KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK
TAHUN 2018**

Hermansyah Putra

ABSTRAK

Begitu pentingnya peran kampanye untuk dapat menarik dan meyakinkan pemilih, dimana semakin masif dan intensif kampanye yang dilakukan maka semakin besar pula dana kampanye yang dibutuhkan. Ketika kampanye membutuhkan dana yang besar, yang akan menjadi persoalan adalah keabsahan atas sumber dana yang dikumpulkan. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat aturan hukum untuk memastikan dana kampanye yang digunakan peserta pemilu berasal dari sumber-sumber yang sah. Pengaturan dana kampanye dimulai dengan pembuatan rekening khusus dana kampanye, pengaturan sumber pendanaan dan pembatasan jumlah sumbangan. Dana kampanye tersebut wajib diserahkan kepada Komisi pemilihan umum sebagai bentuk pertanggungjawaban melalui laporan dana kampanye. Laporan dana kampanye ini kemudian di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk secara resmi oleh KPU untuk memastikan laporan yang diserahkan memenuhi aspek kepatuhan atau tidak. Adapun sanksi administrasi diberikan atas setiap pelanggaran terkait penggunaan dan pelaporan dana kampanye. Dengan serangkaian aturan di atas diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye peserta pemilu.

Kata kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Pengaturan, Dana Kampanye

Nama Jurnal : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

Volume : 6, No 2 (2018)

Doi/Link pdf : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1622/1747>

PERAN KECAMATAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG

Kepastian Haluana'a, Walid Mustafa Sembiring

ABSTRAK

Pada penulisan ini, penelitian dilakukan di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, tentang bagaimana peran kecamatan dalam pembangunan infrastruktur jalan. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran kecamatan dalam pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan Beringin, di mulai dari penyusunan program kegiatan pembangunan yang diadakan ditingkat desa, dimana masing-masing desa melaksanakan Musrenbangdes. Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusrenbangDes) tersebut diajukan kepada pemerintah kecamatan sebagai acuan kegiatan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan. Peran kecamatan sangat menentukan dalam perencanaan kegiatan prioritas utama yang sangat dibutuhkan masyarakat, sebab hasil musrenbang tersebut diajukan kepada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk dapat dianggarkan dan direalisasikannya pembangunan tersebut.

Kata kunci : Peran; Kecamatan; Pembangunan; Infrastruktur Jalan, Deli Serdang

Nama Jurnal : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

Volume : 4, No 1 (2016)

Doi : [10.31289/jppuma.v4i1.299](https://doi.org/10.31289/jppuma.v4i1.299)

Link pdf : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/299>

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP UPAYA KEPALA
KELURAHAN SEBAGAI SALAH SATU UNSUR PELAKSANA
PEMERINTAHAN KOTA MEDAN**

Heri Kusmanto

ABSTRAK

Tulisan ini mengungkapkan persepsi masyarakat terhadap upaya kepala kelurahan sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintahan kota Medan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat yang sudah merasakan adanya kemajuan pembangunan dan keberhasilan terhadap pembangunan yang ada, misalnya sarana dan prasarana jalan yang telah di perbaiki, serta beberapa pembangunan penanganan banjir dan penanganan kebersihan lingkungan. Sosialisasi yang dilakukan oleh kepala kelurahan dalam rangka mempercepat pembangunan kelurahan sudah berjalan sesuai harapan masyarakat. Kewenangan luas yang diberikan kepada daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kepala Kelurahan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan dan dapat meningkatkan kesejahteraan umum baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, dengan otonomi daerah mendekatkan kekuasaan negara kepada masyarakat akan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Kata kunci : Persepsi Masyarakat; Kepala Kelurahan; Unsur Pelaksana; Pemerintahan

Nama Jurnal : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

Volume : 3, No 1 (2015)

Doi : [10.31289/jppuma.v3i1.911](https://doi.org/10.31289/jppuma.v3i1.911)

Link pdf : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/911/917>

TINJAUAN REFLEKTIF MEDIA MASSA DALAM PENDIDIKAN POLITIK DI INDONESIA

Toba Sastrawan Manik, Suharno Suharn

ABSTRAK

Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji bagaimana dan fungsi pendidikan politik media massa di Indonesia khususnya sejak Era Reformasi. Metode yang dilakukan adalah pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*). Kajian ini menemukan bahwa media massa memainkan peran penting dalam pendidikan politik di Indonesia. Media massa dalam negara demokrasi tidak hanya berperan sebagai media informasi, namun juga sebagai medium *political change* terjadi di masyarakat. Kajian ini juga menemukan akar permasalahan pendidikan politik di Indonesia adalah adanya *inequality* (ketidaksamarataan) struktur penguasaan media di Indonesia sehingga media cenderung mengalami deviasi dan keberpihakan politik dalam pemberitaan. Disini dibutuhkan refleksi pendidikan politik di media massa. Hadirnya media *online* dan jaringan internet luas diharapkan dapat menjadi alternatif pendidikan politik, namun terbentur dengan rendahnya angka literasi masyarakat. Keberpihakan media ini tidak bisa dihilangkan, melainkan hanya bisa diminimalisir dengan memperkuat pendidikan politik di sektor lain seperti keluarga, sekolah dan masyarakat. Sekalipun demikian media massa tetap memiliki peran signifikan dalam pendidikan politik namun membutuhkan prasyarat tingkat literasi yang tinggi.

Kata kunci : Media Massa, Pendidikan Politik, Ketidaksamarataan, Literasi

Nama Jurnal : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

Volume : 7, No 1 (2019)

Doi : [10.31289/jppuma.v7i1.2095](https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i1.2095)

Link pdf : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/2095>

PERSEPSI KONSTITUEN TERHADAP ANGGOTA DPRD DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Walid Mustafa Sembiring

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi konstituen terhadap anggota DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Samosir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jumlah populasi seluruh pemilih Kabupaten Samosir yang ikut dalam pemilihan umum bulan April 2009 dengan jumlah 100.000 orang. Sampel dalam penelitian ini diambil secara acak yaitu 3 Kecamatan, dari setiap Kecamatan diambil 2 Desa, dari setiap Desa diambil 2 Dusun dan dari setiap Dusun diambil 5 KK. Sebagai sampel berjumlah 71 KK diambil secara acak dari Kecamatan Pangururan, Onanrunggu, Sianjur Mula-mula. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, penyebaran angket, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik sederhana dengan rumus tabel frekuensi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pendapat responden terhadap anggota DPRD belum berperan dalam menjalankan tugasnya dengan baik didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Samosir, Kepala daerah Kabupaten Samosir bersama dengan anggota DPRD Samosir membentuk perda pada rapat peripurna DPRD Kabupaten Samosir. Anggota DPRD Kabupaten Samosir selalu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya Perda, Perpu dan APBD.

Kata kunci : DPRD; Persepsi; Kesejahteraan Masyarakat, Kabupaten Samosir

Nama Jurnal : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

Volume : 2, No 2 (2014)

Doi/Link pdf : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/917/931>

**PEMASARAN POLITIK BUPATI BIMA TERPILIH PADA PILKADA
KABUPATEN BIMA TAHUN 2015**

Nurfitriani Nurfitriani, Hamrun Hamrun, Ahmad Taufik

ABSTRAK

Pemasaran politik merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam suatu pemilihan karena dapat membantu efektivitas penyusunan produk politik, serta dapat menyampaikan produk politik tersebut secara luas kepada masyarakat. Adanya pemasaran politik membuat hubungan mereka dengan pemilih akan terbangun dan secara tidak langsung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang merupakan konsumen politik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sehingga dapat menjelaskan obyek penelitian di kantor Bupati Bima dan kantor KPU Kabupaten Bima. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan observasi langsung di lokasi penelitian dan wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis melalui reduksi data yaitu merangkum dan fokus pada hal yang penting kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran politik yang dilakukan oleh Bupati Bima terpilih belum efektif karena ada beberapa permasalahan yang dianggap sebagai faktor penghambat pada saat melakukan pemasaran politik.

Kata kunci : Strategi politik, pilkada Kabupaten Bima, komunikasi politik

Nama Jurnal : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

Volume : 5, No 2 (2017)

Doi : [10.31289/jppuma.v5i2.1227](https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i2.1227)

Link pdf : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1227>

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA
PEMERINTAHAN NEGERI DI KECAMATAN SALAHUTU
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**Muhammad Husein Maruapey, Budiman Rusli, Nina Karlina, Mudiyati
Rahmatunnissa**

ABSTRAK

Penelitian ini tentang Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah (Studi di Kecamatan Salahutu). Belum efektif pelaksanaannya walaupun Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 telah berlangsung lama. Permasalahan konflik internal diantara Matarumah Parentah serta intrik dan kepentingan dari Elit Politik Lokal. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif. Berdasarkan penelitian, menunjukkan ketidakefektifan pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri disebabkan Personil atau Sumberdaya Saniri Negeri belum mumpuni, tidak konsisten dengan aturan, kebijakan yang setengah hati dan tidak tegas, kondisi eksternal masyarakat yang terpolarisasi dengan kebijakan Orde Baru. Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu belum efektif dilaksanakan karena, variabel (1) *Idealized Policy*, (2) *Implementation Organization*, (3) *Target Group*, dan (4) *Environmental Factors* tidak dilakukan secara baik oleh Saniri Negeri dan badan pelaksana lainnya.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Kepala Pemerintahan Negeri, Kabupaten Maluku Tengah

Nama Jurnal : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

Volume : 6, No 1 (2018)

Doi : [10.31289/jppuma.v6i1.1559](https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1559)

Link pdf : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1559>

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI COLLABORATIVE
GOVERNANCE DALAM PENANGANAN PEKERJA MIGRAN
BERMASALAH DI KOTA TANJUNGPINANG**

Sigit Sepriandi, Rahmawati Hussein

ABSTRAK

Tanjungpinang merupakan salah satu daerah yang menjadi entry point penampungan dan pemulangan Pekerja Migran Bermasalah (PMB) yang dideportasi dari Malaysia dengan jumlah yang tinggi. Hal ini membuat Pemerintah Kota Tanjungpinang kewalahan mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi collaborative governance yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan PMB di Tanjungpinang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penanganan PMB. Sementara itu pengolahan data menggunakan teknik reduksi. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam penanganan PMB di Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari faktor struktur sosial, kultural dan kepentingan pemerintah. Dari analisis terhadap tiga faktor tersebut, faktor struktur sosial dan kultural tidak terlalu mempengaruhi jalannya kolaborasi. Namun, faktor kepentingan pemerintah menjadi faktor yang menyebabkan gagalnya suatu kolaborasi termasuk dalam hal partisipasi aktif dari pemangku kepentingan dalam pembuatan keputusan.

Kata kunci : Collaborative Governance, Pekerja Migran Bermasalah, Deportasi.

Nama Jurnal : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

Volume : 7, No 1 (2019)

Doi/Link pdf : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/2175/2048>

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM DEMOKRASI POLITIK

Heri Kusmanto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat desa Bondarsihudon Kecamatan Andamdewi Kabupaten Tapanuli Tengah. kebebasan mendapatkan penghidupan yang layak dan kebebasan untuk memperoleh pendidikan dikalangan masyarakat desa Bondarsihudon Kecamatan Andamdewi Kabupaten Tapanuli Tengah di kalangan masyarakat desa Bondarsihudon Kecamatan Andamdewi Kabupaten Tapanuli Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang berdomisili di desa Bondarsihudon Kecamatan Andamdewi yang berjumlah 436 orang, sedangkan sampel penelitian ini adalah 38 KK yang diambil secara acak (*random sampling*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik seperti kebebasan berpendapat, kebebasan mendapatkan penghidupan yang layak dan kebebasan memperoleh akses pendidikan dapat dikategorikan baik, hal ini dapat dilihat dalam setiap kegiatan rapat pembangunan desa, setiap warga diberikan kebebasan memberi aspirasi atau menerima kritikan, dalam kebebasan berkerja, warga memiliki kebebasan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keahliannya, begitu juga dalam memperoleh akses pendidikan, semua warga selalu mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan warga yang lain.

Kata kunci : Masyarakat; Partisipasi; Demokrasi Politik

Nama Jurnal : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

Volume : 2, No 1 (2014)

Doi/Link pdf : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/582>

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA MEDAN

Susi Susanti, Adelita Lubis

ABSTRAK

Partisipasi merupakan salah satu aspek mendasar dalam jalannya Demokrasi pemerintahan. Dalam penelitian ini, Partisipasi Politik Perempuan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari keterlibatan mereka dalam kepengurusan partai. Namun pembahasan dan permasalahan perempuan dengan politik selalu mengalami pasang surutnya suatu partisipasi politik perempuan di Kota Medan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwasanya keterlibatan atau partisipasi politik perempuan di PKS cukup tinggi. Ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yang paling dominan adalah faktor budaya dan faktor kurang dikenalnya perempuan-perempuan dari PKS. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut harus dipahami peran dan wewenang yang dimiliki dan digunakan untuk kemajuan kaum perempuan. Permasalahan yang dipaparkan dalam permasalahan ini yaitu masih rendahnya partisipasi politik perempuan di DPD Kota Medan periode 2009-2014, karena pemenuhan kuota 30% caleg perempuan yang belum benar-benar serius ditetapkan oleh partai-partai yang ada di Indonesia.

Kata kunci : Partisipasi Politik; Perempuan; Partai Keadilan Sejahtera, Kota Medan

Nama Jurnal : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

Volume : 3, No 1 (2015)

Doi : [10.31289/jppuma.v3i1.906](https://doi.org/10.31289/jppuma.v3i1.906)

Link pdf : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/906>